

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.S.S, Tambunan, 1995, Pemilihan Umum di Indonesia dan Susunan & Kedudukan MPR, DPR dan DPRD,(Bandung: Binacipta).
- Al-Iman, Abu Nashr Muhammad, 2004,Membongkar Dosa-dosa Pemilu, (Jakarta : Prisma Media).
- Asshiddiqie, Jimly, 2010,Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Utama).
- Azra, Azyumardi,2000, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN Jakarta,).
- Bakri, Noor Ms, 2012, Pendidikan Kewarganegaraan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)
- Budiharjo, Miriam, 2008, Dasar Dasar Ilmu Politik, rev.ed. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
- Cholisin, 2007, Materi pokok ilmu kewarganegaraan-pendidikan kewarganegaraan, (Yogyakarta: UNY Press).
- Geys, Benny,2006,Explaining Voter Turnout: A Review of Agregate-Level Research, dalam Electoral Studies 25.
- H.I, A Rahman, 2007,Sistem Politik Indonesia,(Jakarta: graha ilmu).
- Haris, Syamsuddin, 2016, Pemilu Nasional Serentak,(Yogyakarta : Pusataka Pelajar).
- Janedri, M. Ghaffar, 2012,Politik Hukum Pemilu, (Jakarta: Konstitusi Pres).
- MD, Moh. Mahfud,2003,Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, (Jakarta: Rhineka Cipta).
- Nurwijayanti, Septi, Nanik Prasetyoningsih, 2006, Politik Ketatanegaraan,(Yogyakarta: LabHukum Fakultas Hukum UMY).
- Sardini, Nur Hidayat, 2011,Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press)
- Sitepu, P. Antonius, 2012,Studi Ilmu Politik, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Soekanto,Soerjono dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

- Sorensen, Georg, 2003, Demokrasi and Demokratization: Processed and Prospects in a Changing Word, Trj. I. Made Krisna, Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek Dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).
- Streb, Matthew Justin, Law and Election Politics: The Rules of the Game, (New York: Routledge).
- Surbakti, Ramlan, 2007, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta, Grasindo).
- Surbakti, Ramlan, 2011, Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan).
- Taupan, M, 1989, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Sinar Grafika)
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Ubaidillah, A, et al, 2000, Pendidikan Kewarganegaraan (civil education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah).

Jurnal

- AbdulRokhim, *“pemilihan umum dengan model “parliamentary threshold” menuju pemerintahan yang demokratis di indonesia”*, dalam jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2011, Vol. 7, No.14, Hal. 85-94
- Agus Adhari, Eksistensi Presidential Trheshold Pada Pemilihan Umum Serentak 2019, (dalam pdf).
- Fadjar, A. Mukthie, Pemilu Yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1 April 2009.
- Hayat, Korelasi Pemilu Serentak Dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial, dalam Jurnal Konstitusi, Vol.11, No.3, September 2014.
- Indarja, Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dalam Jurnal Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1 Januari 2018.
- I Gusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, Rethinking Ketentuan Persentase Sebagai Syarat Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), [S.l.], v.2, n.3, 26 November 2013.

- I Dewa Made Putra Wijaya, Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Jurnal IUS, Vol. II Nomor 6 Desember 2014.
- Jimly Asshiddiqie, 2011, Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial . Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47, Jember, Senin, 14 November,
- Lutfil Ansori, Telaah Terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.
- Mardian Wibowo, Menakar Konstitusionalitas sebuah Kebijakan Hukum Terbuka dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Konstitusi, Volume 12 Nomor 2, Juni 2015.
- Matthew Justin Streb, Law and Election Politics: The Rules of the Game, New York, Routledge, dalam Muhammad Siddiq Armia dkk, Penghapusan *Presidential Threshold* Sebagai Upaya Pemulihan Hak-hak Konstitusional, Petita, Volume 1 Nomor 2, (Oktober 2016).
- Muhammad Mukhtarrija, dkk, Inefektifitas Pengaturan *Presidential Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Volume 24, Nomor 4 Tahun 2017.
- Ratnia Solihah, Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol.3, No. 1, Tahun 2018.
- Ria Casmi Arrsa, Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi, artikel dalam Jurnal Konstitusi, No. 3 Vol. 11 September 2014.
- Rubian Ariviani, dkk, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-IX/2013 Berkaitan dengan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016.
- Sholahuddin Al-Fatih, Implementasi *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota , dalam Jurnal AHKAM, Volume 6, Nomor 2 Tahun 2018.
- Sholehudin Zuhri, PROSES POLITIK DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PEMILU: Analisis Pertarungan Kekuasaan pada Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Jurnal Wacana Politik, Vol. 3, No. 2, Oktober 2018.

Sigit Pamungkas, Perihal Pemilihan umum, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta, 2009.

Triono, Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, Vol. 2, No. 2, Oktober 2017.

Makalah

AndrewsReynolds, dkk, 2005, Electoral System Design : The New International IDEA Handbook, International IDEA, Stockholm, dalam Igusti Ngurah Agung Sayoga Raditya, 2013, Pengaturan Ambang Batas Formal (Formal Threshold) dalam Konteks Sistem Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar).

Natasha Camilla Hufadzah, Quo Vadis: Penetapan Parliamentary Threshold Dan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, FH UNPAD, Bandung, 2017, hlm-12.(Januari 2019)

Modul

Komisi Pemilihan Umum, 2010, Pemilu untuk Pemula, Jakarta, Komisi Pemilihan Umum, Modul I, hlm. 1. (dalam pdf)

Peraturan Perundang-undangan/Naskah Akademik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2008.

Internet

Eri Komar Sinaga, Putusan Mahkamah Konstitusi Berdampak Pada Tak Berlakunya Presidential Treshold, <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/01/23/putusan-mahkamah-konstitusi-berdampak-pada-tak-berlakunya-presidential-treshold>, diakses tanggal 8 Januari 2019.

Imam Agus Faizal, Penyederhanaan Sistem Pemilu Melalui UU No. 7 tahun 2017, 18 Desember 2018, <http://www.calonsh.com/2017/09/05/penyederhanaan-sistem-pemilu-melalui-uu-no7-tahun-2017>

Kemendikbud, ambang batas, 26 November 2017, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/AMBANG%20BATAS>

Djayadi Hanan, Mahkamah Konstitusi, Ahli: Ambang Batas Tidak Mungkin Diterapkan dalam Pemilu Serentak, 28 November 2017, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14119#.WhzJktKWbMy>

Metrotv news, Apa yang Berbeda di Pemilu Serentak 2019?, 18 Desember 2018, <http://video.metrotvnews.com/metro-news/IKYEJDWK-apa-yang-berbeda-di-pemilu-serentak-2019>.